



MENAKER UNGKAP

Penerima BSU Berkurang 1 Juta Orang

JAKARTA (KR) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan, jumlah penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini berkurang atau turun sekitar 1 juta orang dari target awal.

Saat ditemui di kantornya, di Jakarta, Selasa (22/7), Yassierli menyebutkan, sebelumnya Pemerintah menargetkan 17,3 juta orang pekerja yang akan menerima insentif ini. Namun, setelah melakukan verifikasi, ternyata terdapat 16 juta orang pekerja yang laik mendapatkan BSU pada tahun 2025.

"Setelah kita verifikasi, ternyata (jumlah pekerja yang laik mendapatkan BSU) adalah sekitar 16 juta (orang). Saya lupa persisnya berapa," ujar Menaker.

Lebih lanjut Yassierli mengatakan, realisasi distribusi BSU telah mencapai lebih dari 85 persen dari total target penerima manfaat. Namun ia meng-

akui, terdapat kendala penyaluran terutama yang dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Menaker pun memastikan Pemerintah akan menggenjot percepatan penyaluran bantuan tersebut. "Yang agak lama (penyaluran melalui) Pos. Tapi, teman-teman di PT Pos sudah buka bahkan di hari Sabtu dan Minggu, (dengan jam layanan) sampai pukul 21.00," ujarnya lagi.

Sementara itu, ketentuan terkait BSU sudah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah

bagi Pekerja/Buruh.

Dalam Permenaker tersebut, pekerja/buruh yang mendapatkan BSU harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti seorang warga negara Indonesia dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025 dan menerima gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta perbulan.

Selain itu, bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 300.000 perbulan untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus. Bantuan ini diberikan berdasarkan jumlah pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dan ketersediaan pagu anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan. (Ant/San)-d